



Kontradiksi Bisnis Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Papua

TuK Indonesia, Jakarta, 27 Maret 2024

AKUMULASI YANG MERAMPAS

- **Akumulasi kapital**, kontradiksi penggandaan kapital dalam ruang produksi sosial ekonomi, (1) terjadi **eksploitasi** terhadap kelas pekerja dan pemodal mendapatkan nilai lebih; (2) adanya **sentralisasi kapital**, yakni penguasaan asset produksi yang diperoleh dari proses akumulasi modal, melalui eksploitasi dan hasil investasi dan reinvestasi laba dalam kurun waktu panjang, dan melalui merger dan akuisisi usaha dalam jangka pendek, yang terkonsentrasi pada segelintir penguasa modal; (3) krisis lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan, bencana ekologi, gizi buruk dan sebagainya
- Akumulasi awal pada masyarakat non kapitalis dilakukan melalui proses pengalihan hak dan aset produksi dari produsen ke penguasa modal, utamanya tanah dan kekayaan alam untuk kepentingan penggandaan kapital, dengan cara dan didukung kebijakan kekuasaan yang menghancurkan relasi sosial dan cara hidup masyarakat, melalui pengkaplingan lahan produksi (*enclosure*), reorganisasi ruang, kekerasan dan perampasan hak. Harvey (2004) menyebutkan sebagai **Accumulation By Dispossession (ABD)** ; dalam waktu panjang proses proletarisasi menciptakan masyarakat kelas pekerja bebas;
- Adanya kekuatan **oligarki** dengan otoritas dan kuasa modal mempengaruhi dan menentukan kebijakan hukum, ekonomi dan politik; Modal politik dan ekonomi digunakan memobilisasi kekuatan politik untuk melanggengkan sistem kapitalisme dan/atau mencegah ancaman kekuatan anti kapital, termasuk melemahkan dan mengendalikan gerakan sosial.

Periode Sebelum Penjajahan



tanah, air dan segala isinya merupakan milik masyarakat asli Papua yang terorganisasi dalam suku-suku dan marga-marga.

Period Belanda

1855



Misionaris Kristen datang untuk pertama kali ke West Papua. Mereka "membeli" tanah dari orang Papua dengan cara barter.

1930s



Belanda memulai program kolonisasi. Transmigrasi Eropa dari Belanda dan orang Indo-Belanda dari Jawa didatangkan. Perkebunan-perkebunan kolonial mulai dibuka (di Merauke, Manokwari, dan Jayapura).

1898



Pemerintah kolonial Belanda mendirikan pos pemerintahan pertama di atas tanah orang Papua yang 'dibeli' secara barter (dengan kapak, cermin, dan lain-lain). Setelah berkuasa, pemerintah menerapkan hukum agraria 1870 yang berlaku di wilayah jajahan (Hindia Belanda). Seluruh West Papua diklaim sebagai wilayah Belanda dan tanah-tanah yang tidak dimiliki secara pribadi dianggap sebagai tanah negara.

1935



Perusahaan minyak NNGPM [Nederlandsche Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij] mulai beroperasi di Sorong.

1.000.000 ha

Luas konsesi NNGPM, dari daerah Kepala Burung hingga Mimika.



1.000 ha

Tanah yang disewakan pemerintah Belanda ke perkebunan karet Negumij (Nederlandsche Maatschappij voor Nieuw-Guinea) di Ransiki.

6.000 ha

Tanah yang disewakan pemerintah Belanda ke perkebunan Jepang [Nanyo Kohatsu Kaisha] di pantai utara (Jayapura hingga Sarmi).

Period Indonesia

1961-1963



Invasi dan pendudukan oleh Indonesia. Hukum Indonesia mulai diberlakukan di West Papua, termasuk UU agraria Indonesia.

1964



Program transmigrasi dimulai. Hingga tahun 1993, Bank Dunia melaporkan 49,267 keluarga transmigrasi Indonesia (sekitar 272 ribu orang) telah menetap di West Papua. Menurut pemerintah, jumlah transmigrasi diperkirakan 137 ribu keluarga, tak terhitung transmigrasi spontan yang diperkirakan hampir mencapai 500 ribu orang pada tahun 1990an.



Dengan perhitungan satu keluarga diberi jatah 2 ha tanah, tanah orang asli Papua yang diambil untuk program transmigrasi berkisar antara

100.000 hingga 300.000 ha

atau sekitar 10 hingga 30 kali luas kota Paris.

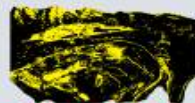
1967



Dua tahun sebelum Papua, Indonesia mulai bekerjasama dengan Freeport McMoran, perusahaan tambang Amerika Serikat.

101.171 ha

Luas konsesi kontrak karya pertama Freeport tahun 1967.



3.642.171 ha

Luas konsesi kontrak karya kedua Freeport tahun 1991 dan 1994.

Selain Freeport, Pemerintah Indonesia memberikan konsesi kepada berbagai perusahaan tambang nasional dan multinasional. Hingga tahun 2016, tanah ulayat orang asli Papua (atau 22% dari luas wilayah West Papua) telah dikuasai tambang.

1980



Perkebunan kelapa sawit mulai beroperasi di West Papua. Hingga tahun 2017, perkebunan kelapa sawit di West Papua diperkirakan seluas

1.015.609,2 ha

atau 15 kali luas kota Jakarta.

1984



Pemerintah Indonesia mulai melepaskan hutan West Papua untuk HPH (hak pengusahaan hutan) dan HTI (hutan tanaman industri). Hingga tahun 2007,

14.000.000 ha

hutan West Papua telah diberikan kepada perusahaan kayu melalui HPH dan HTI. Luas ini setara dengan 1/3 dari seluruh luas West Papua.

1997



Pemerintah Indonesia memberikan konsesi seluas

3.466 ha

ke British Petroleum (BP) untuk beroperasi di West Papua (Teluk Bintuni).

1998-2001



Konsolidasi Gerakan Perlawanan Rakyat Papua untuk Dekolonisasi. Pemerintah Indonesia mengatasi dengan memberikan otonomi khusus untuk West Papua.

2011



Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diberlakukan.

2.500.000 ha

Luas lahan milik orang asli Papua yang dicaplok untuk proyek MIFEE.

2015



Pembangunan instalasi-instalasi militer baru seperti yang telah berlangsung dari tahun 1963.

Markas Kodam XVIII/Kawari di Manokwari memakan lahan seluas

24,7 ha.

2016-now



Program Reforma Agraria melalui TORA. TORA (tanah objek reforma agrarian) adalah kawasan hutan dan tanah negara yang dianggap 'tanah terlantar' dan akan dilepaskan untuk hak kepemilikan (sertifikasi).



20%

dari area pelepasan hutan (melalui TORA) akan digunakan untuk perkebunan.



1.124.975,3 ha

luas hutan West Papua yang SK pelepasannya sudah keluar melalui TORA.



48

jumlah perusahaan kelapa sawit dan tebu yang mendapat konsesi melalui TORA dari 2014-2018.



84.554,51 ha

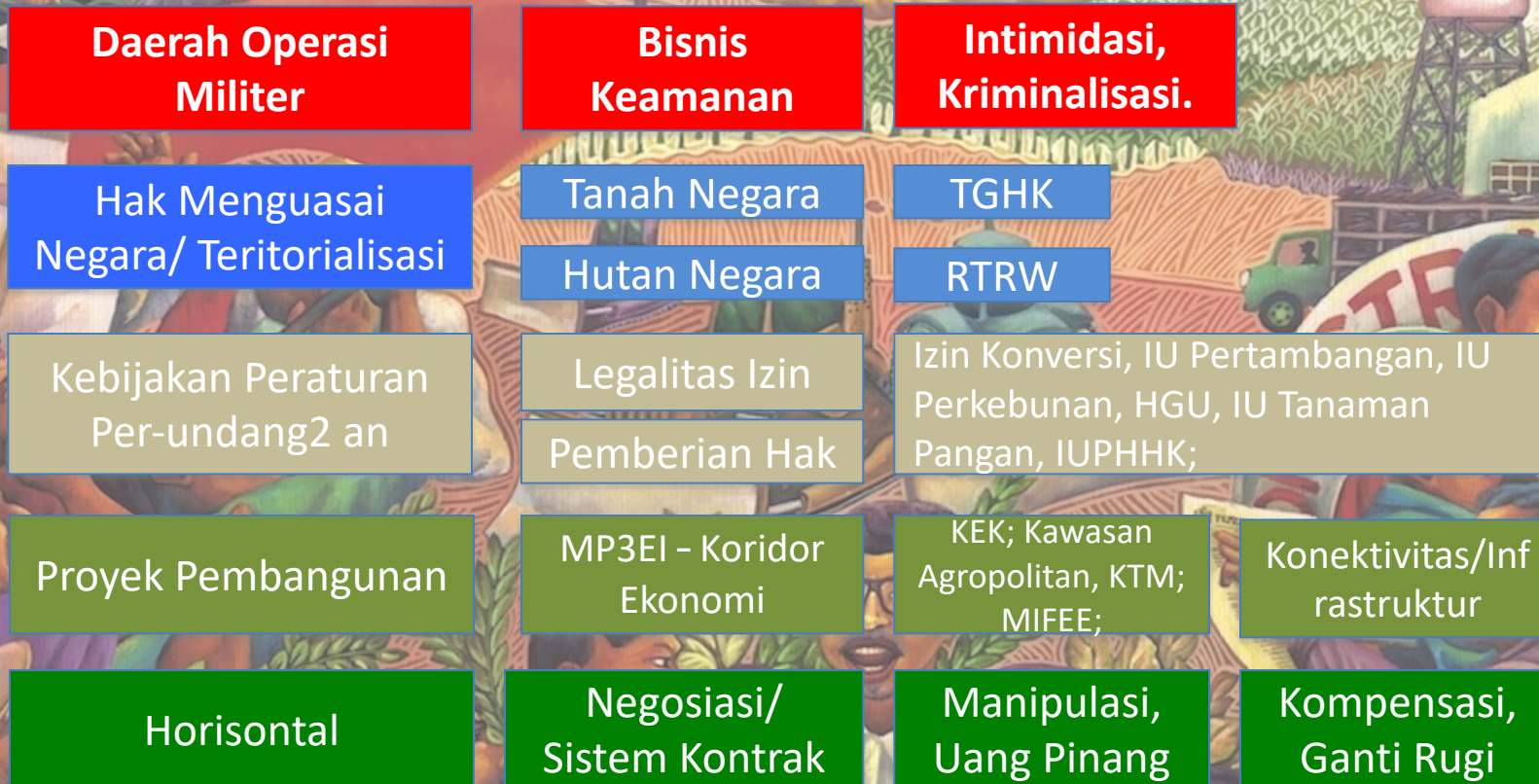
Luas lahan di West Papua yang dilepaskan dari tahun 2015-2018 untuk program TRANSMIGRASI baru.

PETA INVESTASI

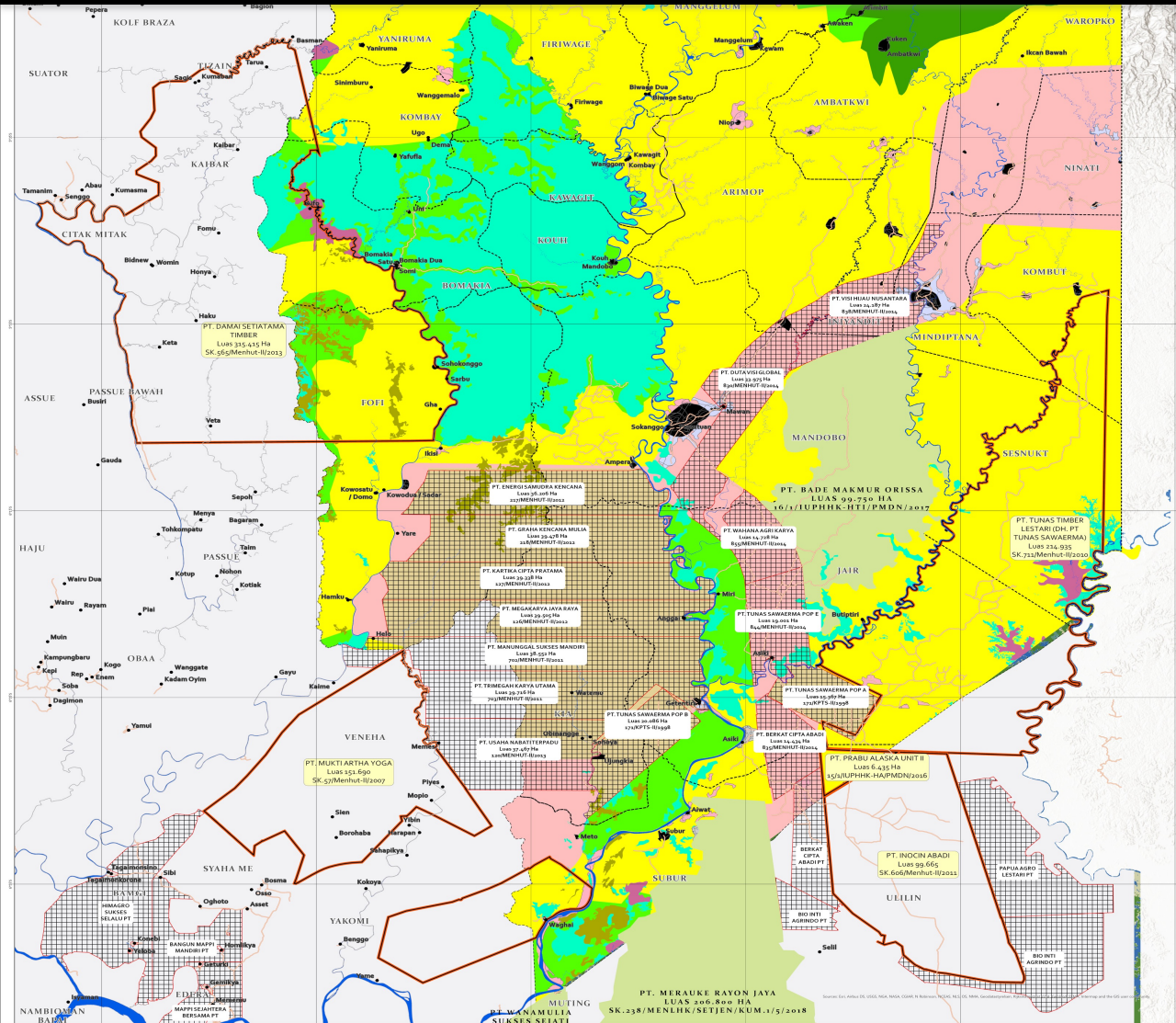
	Izin Tambang		Izin Penebangan Kayu		Izin Hutan Tanaman Industri		Izin Kebun	
	Jml Perusahaan	Luas (Ha)	Jml Perusahaan	Luas (Ha)	Jml Perusahaan	Luas (Ha)	Jml Perusahaan	Luas (Ha)
Prov. Papua Selatan	0	0	5	783.189	8	898.645	29	871.590
Prov. Papua Tengah	34	814.832	3	432.970	0	0	6	158.023
Prov. Papua Pegunungan	4	199.320	0	0	0	0	0	0
Prov. Papua Barat Daya	10	156.536	4	432.068	0	0	16	472.911

 Pacific Interlink Group lahan 154.527 ha	 KORINDO Korindo Group lahan 148.651 ha	 Indo Gunta / Salim Group lahan 135.177 ha	 THE CAPITOL GROUP Capitol Group lahan 97.046 ha	
 ANJ Austindo Nusantara Jaya Group lahan 82.468 ha	 Digoel Agri Group lahan 78.630 ha	 KPN CORP PLANTATION DIVISION KPN Group lahan 73.540 ha	 INDONUSA GROUP Indonusa Agromulia lahan 62.174 ha	 CAA Ciliandry Anky Abadi lahan 53.968 ha
 bank Sinar Mas GAR / Sinar Mas Group lahan 40.678 ha	 EAGLE HIGH PLANTATIONS Eagle High Plantation Group lahan 38.893 ha	 POSCO INTERNATIONAL Posco International Group lahan 36.400 ha	 noble group Noble Group lahan 35.759 ha	 Goodhope Goodhope Holding Group lahan 25.950 ha

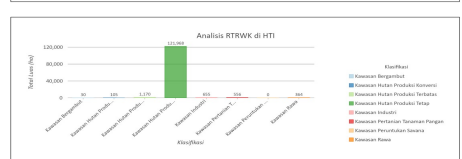
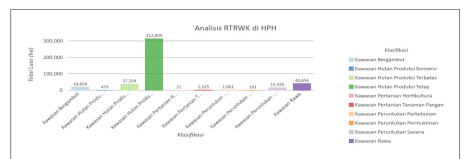
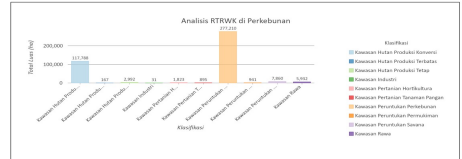
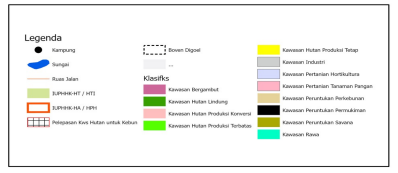
KOMODIFIKASI DAN POLA PERAMPASAN



PROYEK TANAH MERAH



ANALISIS RTRWK BOVEN DIGOEL USAHA PEMANFAATAN LAHAN & HUTAN BOVEN DIGOEL - PAPUA

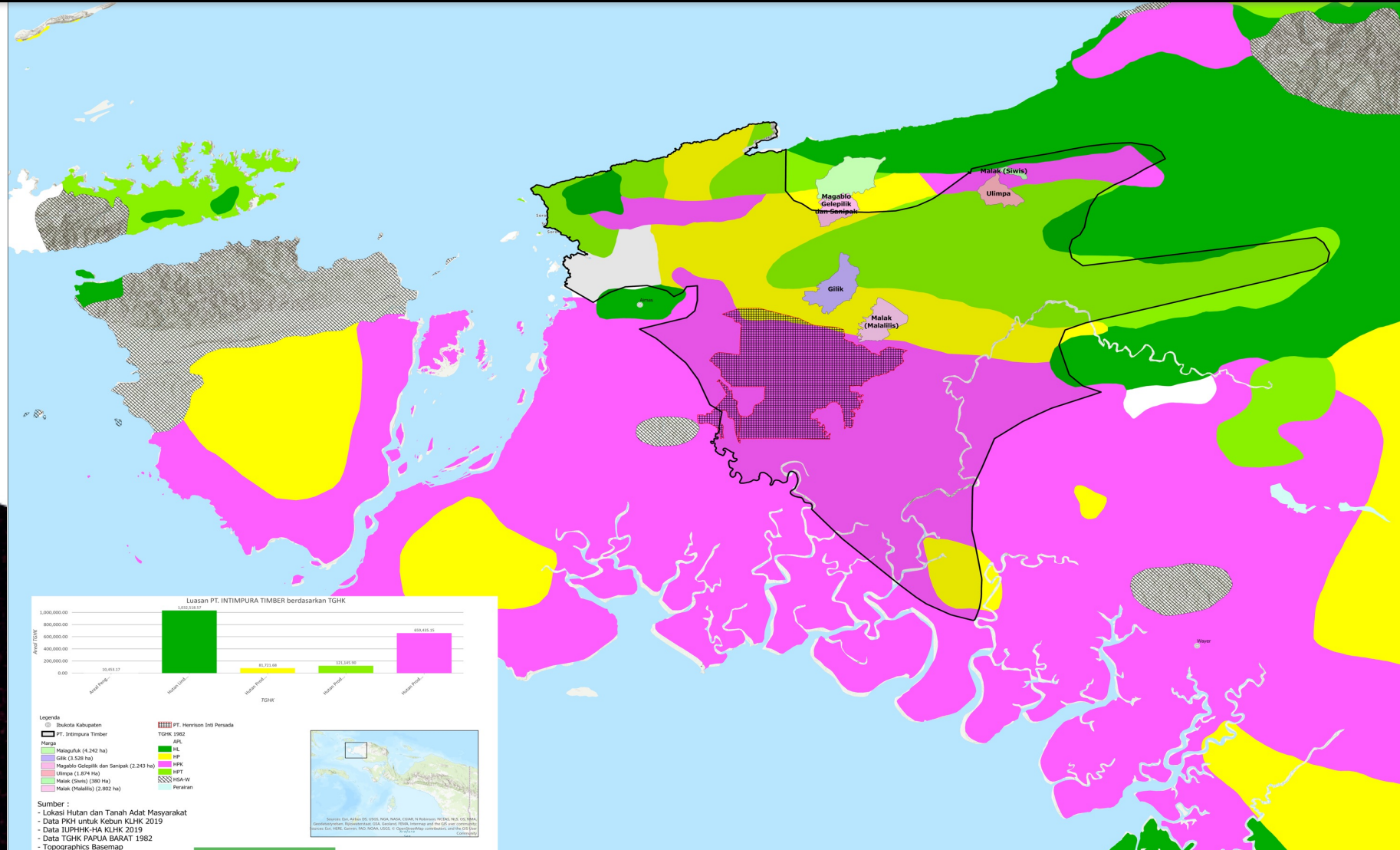


Referensi Peta:
 Data Boven Digoel, Tahun 1952-2019
 Data Boven Digoel, Tahun 1971
 Data Peta Rupa Bumi, Tahun untuk Sektor KLHK 1971
 Data Peta Rupa Bumi, Tahun 2000
 Data DPT/REK-RT/2018, 2015
 Data DPT/REK-RT/2018, 2013

Map UTM, Degree
 Digital Reference
 Nomor: 021/002/2019
 021/002/2019
 021/002/2019
 Page UTM, Degree



KASUS CILIANDRY ANKY ABADI







PT Inti Kebun Sejahtera,
Sorong

PT Inti Kebun Sawit,
Sorong

PT Permata Nusa Mandiri,
Jayapura

PT Subur Karunia Raya,
Teluk Bintuni

PT Selaras Inti Semesta,
Merauke

DEFORESTASI TERLUAS DI PAPUA ADA DI 5 KONSESI PERUSAHAAN

01

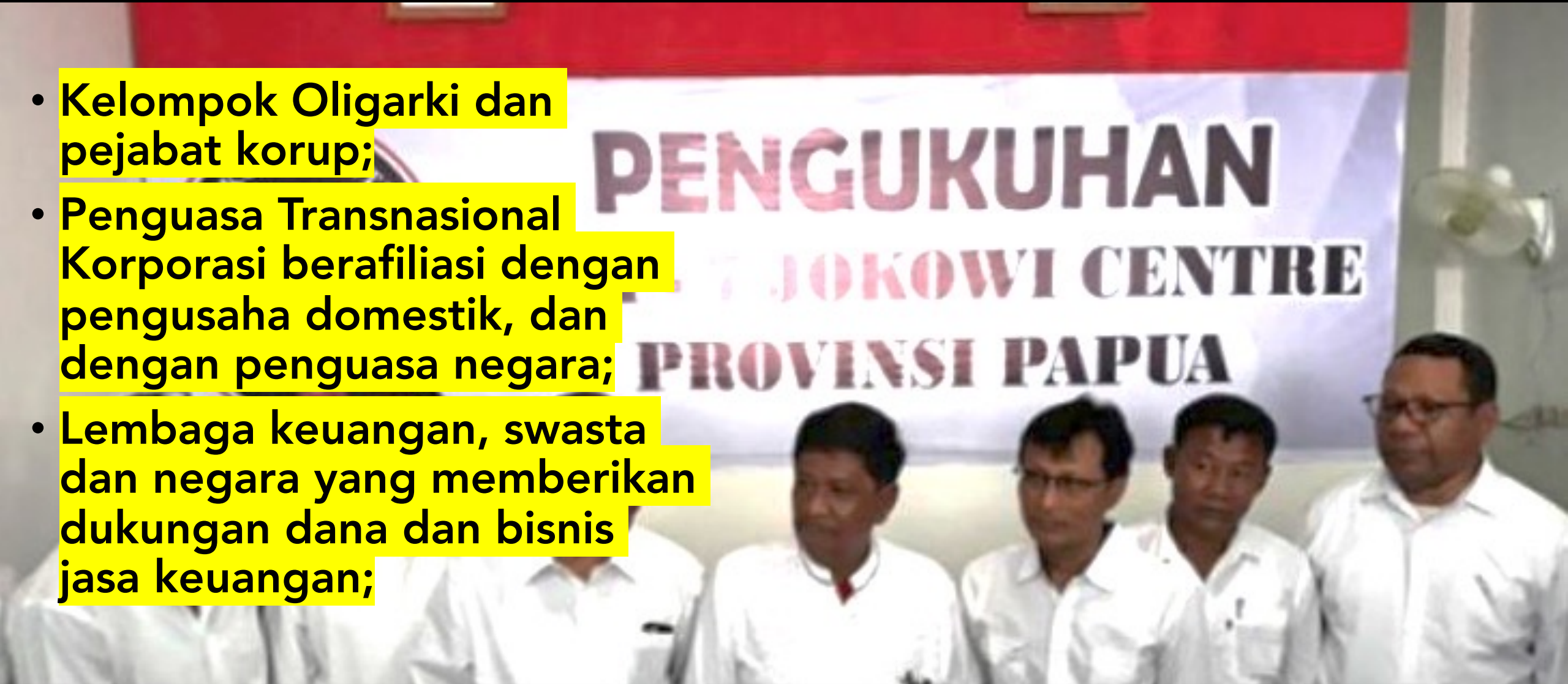
Diolah dari: <https://map.nusantara-atlas.org>

NUSANTARA ATLAS

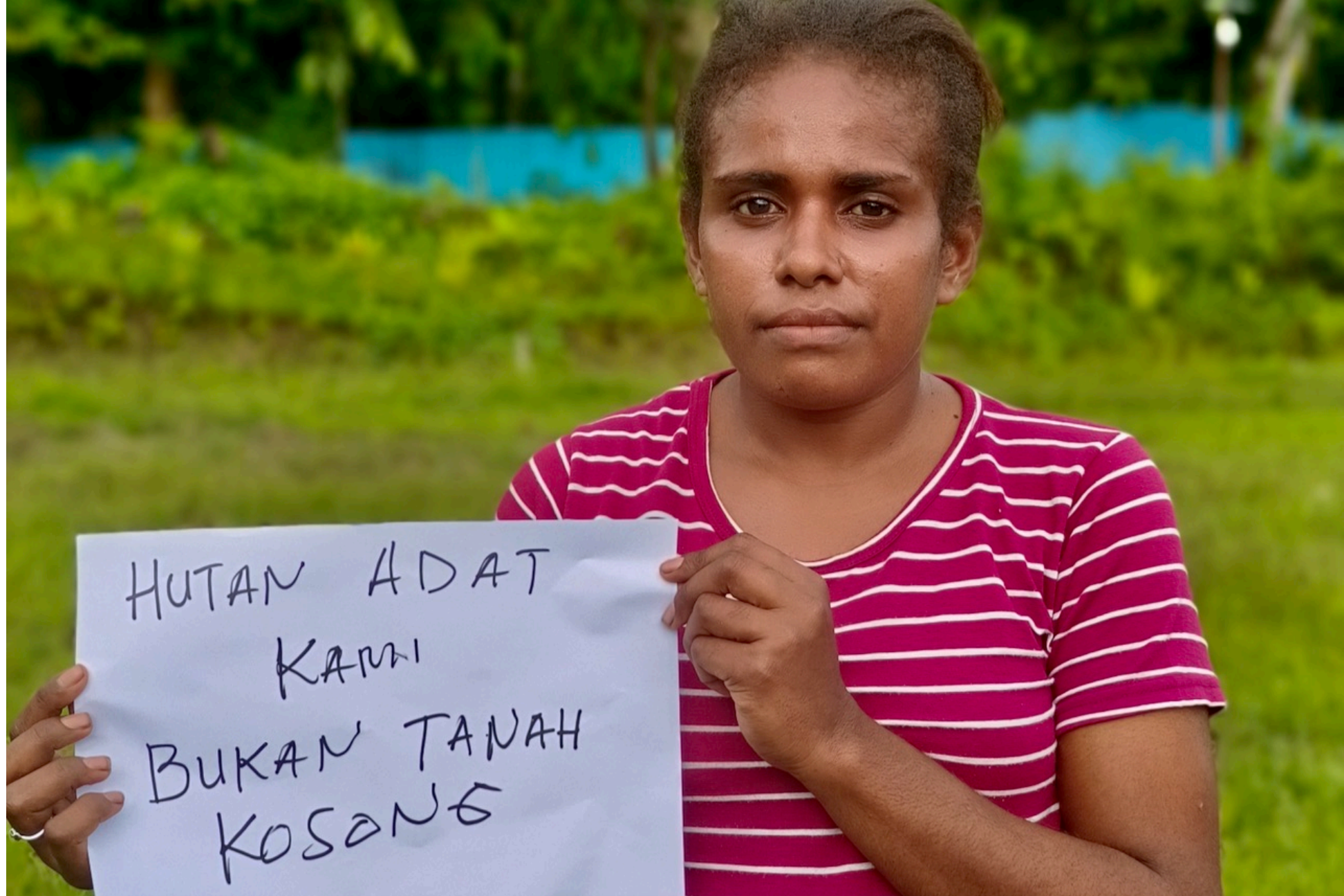


SIAPA YANG DIUNTUNGGAN

- Kelompok Oligarki dan pejabat korup;
- Penguasa Transnasional Korporasi berafiliasi dengan pengusaha domestik, dan dengan penguasa negara;
- Lembaga keuangan, swasta dan negara yang memberikan dukungan dana dan bisnis jasa keuangan;



PENGUKUHAN
JOKOWI CENTRE
PROVINSI PAPUA



HUTAN ADAT
KAMI
BUKAN TANAH
KOSONG